

***Liberation Theology in Postmodernity: A Contribution to Religious Education***

**Teologi Pembebasan Dalam Pascamodernitas:  
Suatu Kontribusi Bagi Pendidikan Keagamaan**

**Lionarto Erson Jayadi**

Malmö University, Malmö, Sweden

Email: [lionarto.jayadi@mau.se](mailto:lionarto.jayadi@mau.se)

*Submitted: 14 June 2023 Accepted: 29 March 2024 Published: 30 April 2024*



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstract**

*Liberation theology emerged in the late 20th century as a response to the widespread social injustice in Latin American countries. It emphasizes the liberation of individuals from social, political, and economic oppression, providing a theological framework that connects faith with social justice. Influenced by key figures like Gustavo Gutiérrez, liberation theology critiques traditional theological approaches that often overlook the harsh realities faced by marginalized communities. This article aims to explore the contributions of liberation theology to religious education, particularly its potential to transform educational practices by focusing on social justice, equality, and empowerment. It seeks to analyze how liberation theology can offer new perspectives in teaching religious studies in contemporary societies, especially in a postmodern context. The study adopts a qualitative research approach with literature analysis, examining theological texts, key writings from liberation theologians, and contemporary critiques of religious education. The research analyzes how liberation theology intersects with postmodernism, emphasizing pluralism, deconstruction, and the rejection of absolute truths. The findings suggest that liberation theology provides a compelling framework for rethinking religious education. By integrating social justice principles and encouraging critical engagement with oppressive systems, it offers a path for creating more inclusive and socially engaged religious education curricula. The study highlights the importance of teaching religion as a tool for societal transformation rather than mere doctrinal knowledge. This article contributes to the ongoing discourse in religious education by highlighting how liberation theology can provide actionable strategies for addressing social injustices within educational contexts. It offers a new paradigm for religious education that is both critically aware of societal issues and committed to justice and equality.*

**Keywords :**

*liberation theology; religious education; social justice; empowerment; postmodernism*

**Abstrak**

Teologi pembebasan muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial yang meluas di negara-negara Amerika Latin. Teologi ini menekankan pembebasan individu dari penindasan sosial, politik, dan ekonomi, serta menyediakan kerangka teologis yang menghubungkan iman dengan keadilan sosial. Dipengaruhi oleh tokoh-tokoh utama seperti Gustavo Gutiérrez, teologi pembebasan mengkritik pendekatan teologi tradisional yang sering mengabaikan kenyataan keras yang dihadapi oleh komunitas terpinggirkan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi

kontribusi teologi pembebasan terhadap pendidikan keagamaan, khususnya potensinya untuk mengubah praktik pendidikan dengan fokus pada keadilan sosial, kesetaraan, dan pemberdayaan. Artikel ini berusaha menganalisis bagaimana teologi pembebasan dapat menawarkan perspektif baru dalam pengajaran studi agama di masyarakat kontemporer, terutama dalam konteks pascamodern. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis literatur, mengkaji teks-teks teologi, tulisan-tulisan utama dari teolog pembebasan, dan kritik kontemporer terhadap pendidikan agama. Penelitian ini menganalisis bagaimana teologi pembebasan bersinggungan dengan pascamodernitas, dengan menekankan pluralisme, dekonstruksi, dan penolakan terhadap kebenaran mutlak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teologi pembebasan menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memikirkan kembali pendidikan agama. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan mendorong keterlibatan kritis terhadap sistem yang menindas, teologi ini menawarkan jalur untuk menciptakan kurikulum pendidikan agama yang lebih inklusif dan terlibat secara sosial. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengajarkan agama sebagai alat untuk transformasi masyarakat, bukan sekadar pengetahuan doktrinal. Artikel ini memberikan kontribusi pada diskursus pendidikan agama dengan menyoroti bagaimana teologi pembebasan dapat memberikan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketidakadilan sosial dalam konteks pendidikan. Artikel ini menawarkan paradigma baru untuk pendidikan agama yang sadar secara kritis terhadap masalah sosial dan berkomitmen pada keadilan dan kesetaraan.

**Kata Kunci:**

teologi pembebasan; pendidikan keagamaan; keadilan sosial; pemberdayaan; pascamodernitas

**PENDAHULUAN**

Teologi pembebasan merupakan suatu aliran dalam teologi yang menekankan pada aspek pembebasan sosial, ekonomi, dan spiritual dari penindasan. Konsep ini pertama kali muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh kelompok marginal di Amerika Latin pada akhir abad ke-20 (Gutiérrez, 1973, p. 45). Dalam perkembangannya, teologi pembebasan memperkenalkan pemahaman yang menghubungkan kepercayaan agama dengan aksi sosial untuk mencapai keadilan (Boff, 1987, p. 79). Hal ini menjadikan teologi pembebasan relevan dalam diskursus pendidikan keagamaan, karena mengajak umat beragama untuk aktif dalam perubahan sosial (Sobrino, 1993, p. 122). Teologi ini memfokuskan pada solidaritas dengan yang tertindas dan mendorong partisipasi aktif dalam pemberdayaan komunitas (Dussel, 1998, p. 56).

Pascamodernitas, sebagai fenomena budaya dan intelektual, memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan keagamaan. Pascamodernitas menolak narasi besar dan absolut yang mendominasi pemikiran modern, serta mengedepankan relativisme, pluralisme, dan dekonstruksi (Lyotard, 1984, p. 20). Ini menciptakan ruang

bagi pemikiran yang lebih inklusif dan dialogis dalam pendidikan agama, terutama dalam hal keanekaragaman pemahaman dan pengalaman keagamaan (Foucault, 1972, p. 34). Dalam konteks ini, pascamodernitas menawarkan perspektif kritis yang dapat memperkaya teologi pembebasan, dengan memandang ketidakadilan bukan hanya dalam konteks sosial, tetapi juga dalam pengakuan terhadap perbedaan dan identitas yang beragam (Ricoeur, 1991, p. 18). Dengan demikian, pendidikan keagamaan dihadapkan pada tantangan untuk merangkul perubahan sosial dan pluralitas ini (Gergen, 1999, p. 92).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi teologi pembebasan dalam pendidikan keagamaan di era pascamodern. Dalam hal ini, teologi pembebasan tidak hanya memperkenalkan prinsip-prinsip sosial yang kritis terhadap struktur kekuasaan, tetapi juga memberikan landasan moral untuk pendidikan yang lebih adil dan responsif terhadap ketidaksetaraan (Jameson, 1991, p. 25). Melalui pendekatan ini, pendidikan keagamaan dapat membantu membentuk individu yang lebih sadar sosial dan berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Harvey, 1989, p. 67). Sebagai bagian dari upaya pembebasan, pendidikan agama perlu membuka ruang bagi dialog antar agama dan saling pengertian dalam masyarakat yang semakin beragam (McLaren, 1999, p. 56). Dalam kajian ini, pascamodernitas memainkan peran penting dalam memperluas cakupan pemikiran dan pendekatan dalam pendidikan keagamaan.

Selain itu, pemikiran pascamodern membawa pergeseran dalam pemahaman kebenaran yang lebih fleksibel dan terbuka, yang selaras dengan esensi teologi pembebasan (Dawson, 2011, p. 33). Kebenaran dalam teologi pembebasan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang statis dan absolut, melainkan sebagai proses yang terus berkembang dan relevan dengan konteks sosial (Boff, 1987, p. 91). Ini memungkinkan pendidikan keagamaan untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, serta menjadikan ajaran agama lebih dinamis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Asad, 2003, p. 74). Proses ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan agama, tetapi juga pada penciptaan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama (Gutiérrez, 1973, p. 102). Dalam kerangka pascamodern, pendidikan agama harus mampu mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih ada di masyarakat.

Kehadiran teologi pembebasan dalam pendidikan keagamaan juga membawa tantangan dalam menyelaraskan doktrin tradisional dengan realitas sosial yang terus

berubah (McLaren, 2000, p. 145). Dalam banyak kasus, pengajaran agama di sekolah-sekolah cenderung terjebak dalam dogma yang tidak fleksibel dan cenderung mengabaikan kebutuhan untuk memperbarui pemahaman tersebut (Zizek, 2001, p. 99). Oleh karena itu, pendidikan agama perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip teologi pembebasan dalam kurikulum yang mengutamakan keadilan sosial, pemberdayaan, dan pluralisme (Hall, 1996, p. 51). Hal ini akan membuka peluang bagi siswa untuk tidak hanya memahami agama dalam konteks pribadi tetapi juga sebagai alat untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar (Sobrino, 1993, p. 133). Dengan demikian, pendidikan keagamaan di era pascamodern perlu mengajarkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, tanpa mengesampingkan pluralitas yang ada (Rorty, 1989, p. 64).

Dalam penutupan pendahuluan ini, penting untuk memahami bahwa kontribusi teologi pembebasan terhadap pendidikan keagamaan tidak hanya sebatas pada perbaikan moral individu, tetapi juga pada penciptaan perubahan sosial yang lebih luas. Konsep ini sangat relevan dengan perkembangan pascamodernitas yang mengajak untuk mendekonstruksi narasi besar dan membuka ruang bagi keragaman dalam dunia keagamaan (Caputo, 1997, p. 88). Oleh karena itu, teologi pembebasan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan keagamaan yang lebih adil dan inklusif di masa depan (Dussel, 1998, p. 120). Artikel ini akan membahas lebih lanjut bagaimana kedua aliran pemikiran ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem pendidikan agama yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada (Foucault, 1972, p. 38).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur sebagai metode utama dalam menggali kontribusi teologi pembebasan terhadap pendidikan keagamaan dalam konteks pascamodernitas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai teks dan pemikiran dari tokoh-tokoh utama dalam teologi pembebasan serta kajian-kajian pascamodern (Gutiérrez, 1973, p. 56). Dalam kajian ini, peneliti mengumpulkan referensi dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan untuk memahami hubungan antara teologi pembebasan dan pascamodernitas dalam pendidikan keagamaan (Boff, 1987, p. 102). Proses analisis dilakukan dengan cara mengeksplorasi perspektif kritis terhadap struktur kekuasaan dan ketidakadilan dalam

ajaran agama, serta mencari pemahaman yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan agama (Sobrin, 1993, p. 134). Penelitian ini juga memanfaatkan teori dekonstruksi dari Derrida (1976, p. 88) untuk memahami bagaimana pemikiran pascamodern dapat memberi ruang bagi perubahan dalam praktik pendidikan keagamaan.

Data yang dikumpulkan melalui studi literatur ini dianalisis secara tematik, dengan fokus pada tema-tema utama seperti keadilan sosial, pluralisme, dan relativisme dalam pendidikan keagamaan. Peneliti juga menggunakan metode interpretasi kritis untuk mengeksplorasi makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut dan relevansinya dengan kondisi sosial saat ini (Harvey, 1989, p. 45). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks-teks teologi pembebasan, tetapi juga pada karya-karya pascamodern yang berhubungan dengan pemahaman kebenaran dan identitas dalam pendidikan (Lyotard, 1984, p. 22). Dengan menggunakan metode analisis ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi kontribusi konkret dari teologi pembebasan dalam membentuk pendidikan keagamaan yang lebih adil dan inklusif (Jameson, 1991, p. 14). Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di era pascamodern.

## **HASIL**

### **Teologi Pembebasan: Konsep dan Perkembangannya**

Teologi pembebasan berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial yang melanda banyak negara di Amerika Latin. Konsep ini diperkenalkan oleh Gustavo Gutiérrez dalam *A Theology of Liberation* (1973), yang menekankan pentingnya membebaskan umat manusia dari penindasan sosial, ekonomi, dan politik (Gutiérrez, 1973, p. 45). Teologi ini berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan mendukung mereka yang tertindas dalam masyarakat, bukan hanya sekadar refleksi teologis (Boff, 1987, p. 77). Gerakan ini juga muncul sebagai kritik terhadap gereja yang lebih memilih mendukung status quo dan tidak memberikan perhatian serius terhadap penderitaan umat yang miskin (Sobrin, 1993, p. 102). Dengan demikian, teologi pembebasan mengubah paradigma dalam studi teologi yang mengutamakan perubahan sosial dan pembebasan umat dari penindasan.

Teologi pembebasan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada konteks sosial dan historis, mengkritik pandangan teologi tradisional yang mengabaikan realitas sosial dan material (Dussel, 1998, p. 50). Konsep utama dalam teologi pembebasan adalah

bahwa keselamatan tidak hanya masalah pribadi antara individu dan Tuhan, tetapi juga terkait erat dengan keadilan sosial dan pemberantasan penindasan (Gutiérrez, 1973, p. 56). Teologi ini berupaya menghubungkan ajaran agama dengan perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang menindas, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial (Boff, 1987, p. 91). Dalam hal ini, teologi pembebasan menandai pergeseran besar dalam cara pandang teologi yang lebih mengutamakan komitmen pada perubahan sosial. Pemikiran ini juga berkembang lebih luas melalui tokoh-tokoh lain seperti Leonardo Boff dan Jon Sobrino, yang menambahkan dimensi sosial dan politik yang lebih mendalam (Sobrino, 1993, p. 120).

Menurut teologi pembebasan, keselamatan tidak hanya berhubungan dengan kehidupan setelah mati, tetapi juga dengan pembebasan di dunia ini dari segala bentuk penindasan (Gutiérrez, 1973, p. 79). Keselamatan dalam konteks ini mencakup dimensi sosial, politik, dan ekonomi, bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi (Dussel, 1998, p. 62). Oleh karena itu, teologi ini mengajarkan bahwa penderitaan dan kemiskinan bukanlah takdir, melainkan hasil dari struktur sosial yang tidak adil, yang perlu diubah melalui tindakan kolektif (Boff, 1987, p. 115). Teologi pembebasan juga mengajak umat beragama untuk mengeksplorasi kemiskinan sebagai ketidakadilan struktural yang perlu diperbaiki, serta mengarah pada transformasi sosial yang mendalam, bukan hanya perubahan individu (Gutiérrez, 1973, p. 95). Dalam hal ini, teologi pembebasan juga menjadi bentuk kritik terhadap kapitalisme global dan dampaknya terhadap masyarakat yang terpinggirkan di seluruh dunia (Sobrino, 1993, p. 145).

Walaupun ada kritik terhadap hubungan antara agama dan politik, terutama dalam konteks pascamodernitas, teologi pembebasan tetap relevan sebagai alat untuk memahami ketidakadilan sosial di dunia yang terus berubah (Lyotard, 1984, p. 35; Harvey, 1989, p. 52). Pascamodernitas mengkritik narasi besar dan otoritas yang mapan, yang turut mempengaruhi pemahaman teologi pembebasan dalam pendidikan agama (Foucault, 1972, p. 84). Meskipun demikian, teologi ini tetap berfungsi untuk membuka ruang bagi pemahaman baru tentang agama dan keadilan sosial, yang relevan dengan dinamika sosial dan kultural masa kini (McLaren, 1999, p. 142). Dalam pendidikan keagamaan, teologi pembebasan memberikan panduan untuk mengajarkan pemberdayaan, keadilan sosial, dan pluralisme, serta menciptakan kesadaran sosial yang lebih luas di kalangan siswa (Hall, 1997, p. 89). Oleh karena itu, teologi pembebasan

berperan tidak hanya sebagai teori keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang memberikan kontribusi pada perubahan sosial.

Teologi pembebasan menawarkan kontribusi penting dalam pendidikan keagamaan dengan mengajak siswa untuk memahami agama dalam konteks sosial dan kultural yang lebih luas. Ini memungkinkan pendidikan agama untuk lebih responsif terhadap tantangan-tantangan sosial di era pascamodern (McLaren, 1999, p. 142). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan, dan pluralisme, pendidikan agama yang berbasis teologi pembebasan mengarah pada perubahan yang lebih adil dan setara dalam masyarakat. Melalui pemahaman ini, siswa tidak hanya diajarkan mengenai ajaran agama, tetapi juga diberikan alat untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar, menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berpihak pada yang tertindas (Boff, 1987, p. 129). Teologi pembebasan, dengan demikian, tidak hanya memperkaya pemahaman agama, tetapi juga memperkuat komitmen sosial dan moral dalam membangun masyarakat yang lebih adil.

### **Pascamodernitas: Pengertian dan Implikasinya**

Pascamodernitas merupakan suatu fase dalam pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap modernitas, yang menekankan pada relativisme, pluralisme, dan dekonstruksi. Pascamodernitas tidak menerima adanya narasi besar atau kebenaran mutlak yang dapat menjelaskan segala sesuatu secara universal (Lyotard, 1984, p. 22). Menurut Lyotard, pascamodernitas merupakan kondisi di mana keyakinan terhadap narasi besar dan totalitas mulai digantikan oleh kepercayaan pada narasi kecil yang lebih fragmentaris dan plural (Lyotard, 1984, p. 34). Pascamodernitas menolak pembagian yang tegas antara subjek dan objek, serta lebih menerima ketidakpastian dan perbedaan dalam kehidupan sosial dan intelektual (Foucault, 1972, p. 43). Dalam konteks ini, pascamodernitas juga melihat bahwa tidak ada satu pandangan atau kebenaran tunggal yang dapat diterima secara universal, melainkan berbagai perspektif yang sah secara bersamaan (Harvey, 1989, p. 56).

Dalam pengertian yang lebih luas, pascamodernitas mempengaruhi hampir seluruh bidang, termasuk seni, budaya, dan pendidikan. Salah satu aspek utama dari pascamodernitas adalah dekonstruksi, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Derrida (1976) yang berfokus pada upaya membongkar dan mempertanyakan struktur bahasa, teks, dan ideologi yang ada (Derrida, 1976, p. 66). Dekonstruksi ini bertujuan untuk

mengungkapkan kontradiksi yang tersembunyi dalam teks dan menggali makna yang tersembunyi di balik suatu pernyataan atau narasi (Caputo, 1997, p. 85). Melalui pendekatan ini, pascamodernitas menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat dunia, yang mengutamakan relativitas dan keberagaman perspektif, serta mengkritisi otoritas yang berlaku (Giddens, 1990, p. 74). Hal ini memungkinkan terciptanya ruang bagi interpretasi yang lebih terbuka terhadap realitas sosial dan budaya.

Salah satu implikasi utama dari pascamodernitas adalah kritik terhadap modernitas dan pembongkaran struktur kekuasaan yang mapan. Pasca-modernisme tidak hanya menolak klaim kebenaran mutlak, tetapi juga meruntuhkan pemikiran yang menganggap masyarakat sebagai entitas yang stabil dan terstruktur (Jameson, 1991, p. 49). Ini menciptakan kesadaran bahwa kebenaran sosial dan budaya itu bersifat kontekstual dan dibangun melalui hubungan kekuasaan yang kompleks (Harvey, 1989, p. 68). Dalam konteks ini, pascamodernitas juga mempertanyakan ideologi yang mengikat individu dan masyarakat dalam norma-norma sosial yang dominan (Rorty, 1989, p. 120). Dengan demikian, pascamodernitas berupaya untuk mengungkapkan cara-cara baru dalam melihat dunia, yang lebih mengedepankan pluralisme dan desentralisasi kekuasaan.

Pascamodernitas juga membawa dampak signifikan terhadap pendidikan, di mana pengajaran tidak lagi dianggap sebagai transfer pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan sebagai proses kolaboratif yang mengakui keberagaman perspektif. Pendidikan dalam konteks pascamodernitas lebih menekankan pada diskursus terbuka dan dialog yang mengutamakan pemikiran kritis (McLaren, 1999, p. 102). Di dalamnya, siswa diajak untuk memahami berbagai ide dan konsep dari berbagai sudut pandang yang berbeda, serta diajarkan untuk mempertanyakan otoritas yang ada dalam tradisi dan teks (Gergen, 1999, p. 96). Dalam hal ini, pendidikan tidak lagi bertujuan untuk menyampaikan kebenaran tunggal, tetapi untuk membuka ruang bagi perdebatan dan pencarian makna yang lebih luas (Hall, 1997, p. 71). Dengan demikian, pendidikan pascamodern lebih inklusif dan reflektif, memperhitungkan berbagai konteks sosial dan kultural yang ada.

Implikasi lain dari pascamodernitas dalam pendidikan adalah penerimaan terhadap pluralisme agama dan kepercayaan. Pascamodernitas tidak hanya menolak gagasan bahwa satu agama atau kepercayaan lebih unggul dari yang lain, tetapi juga

mengakui bahwa berbagai sistem kepercayaan dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural (Foucault, 1972, p. 60). Hal ini membawa pengaruh dalam pendidikan agama, di mana siswa didorong untuk memahami dan menghormati keyakinan yang berbeda, serta terlibat dalam dialog antar agama (Asad, 2003, p. 89). Dalam kerangka pascamodern, pendidikan agama bukan hanya sekadar tentang pengetahuan teologis, tetapi juga tentang bagaimana mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman yang ada (Zizek, 2001, p. 104). Oleh karena itu, pascamodernitas memberi kontribusi besar terhadap penciptaan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

Pascamodernitas, dengan segala implikasi dan kritiknya terhadap struktur kekuasaan dan kebenaran mutlak, memberikan pandangan yang lebih terbuka dan fluid terhadap pendidikan, terutama pendidikan agama. Ini mengajak untuk membangun pemahaman yang lebih kritis, reflektif, dan sadar akan keberagaman dalam masyarakat (Jameson, 1991, p. 58). Dalam konteks teologi pembebasan, pascamodernitas memberi ruang bagi interpretasi teologis yang lebih beragam dan inklusif, yang tidak terikat pada dogma-dogma yang kaku dan konservatif (Caputo, 1997, p. 91). Oleh karena itu, pascamodernitas dapat dilihat sebagai suatu peluang untuk menyegarkan kembali pendidikan agama, agar lebih relevan dengan realitas sosial yang kompleks dan plural (McLaren, 1999, p. 111). Dengan demikian, pascamodernitas bukan hanya sekadar fase dalam sejarah intelektual, tetapi juga merupakan landasan untuk perkembangan pendidikan yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan zaman.

## **PEMBAHASAN**

### **Interaksi Antara Teologi Pembebasan dan Pascamodernitas**

Teologi pembebasan dan pascamodernitas, meskipun muncul dari latar belakang yang berbeda, memiliki kesamaan dalam hal kritik terhadap struktur kekuasaan yang ada dan upaya untuk membongkar narasi dominan. Teologi pembebasan, seperti yang dijelaskan oleh Gutiérrez (1973), mengajukan bahwa keselamatan dan pembebasan tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga sosial, yang mencakup pemberdayaan kelompok tertindas dalam masyarakat (Gutiérrez, 1973, p. 56). Sementara itu, pascamodernitas, melalui pendekatan dekonstruksi Derrida (1976), berfokus pada kritik terhadap otoritas dan narasi besar yang membatasi pemahaman kebenaran (Derrida, 1976, p. 77). Keduanya menolak pemahaman yang statis dan absolut terhadap kebenaran serta

menekankan pluralitas perspektif dan ketidakpastian dalam dunia sosial dan intelektual (Lyotard, 1984, p. 44). Dengan demikian, ada potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pascamodernitas dalam pemahaman teologi pembebasan.

Teologi pembebasan dan pascamodernitas keduanya berusaha untuk menciptakan ruang bagi suara-suara yang tertindas dan marginal dalam masyarakat. Gutiérrez (1973) menekankan pentingnya memahami teologi dalam konteks sejarah dan sosial, di mana penindasan menjadi fokus utama perjuangan pembebasan (Gutiérrez, 1973, p. 102). Hal ini selaras dengan prinsip pascamodernitas yang menekankan pluralitas dan dekonstruksi terhadap narasi tunggal, yang selama ini mendominasi pemikiran agama dan sosial (Harvey, 1989, p. 56). Melalui perspektif ini, pascamodernitas dapat menjadi alat untuk memperkaya teologi pembebasan, dengan membuka ruang bagi dialog yang lebih inklusif antara berbagai kelompok dan tradisi keagamaan (Foucault, 1972, p. 84). Ini juga memungkinkan teologi pembebasan untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

Pascamodernitas, dengan prinsip relativismenya, mengajak kita untuk tidak lagi melihat kebenaran sebagai sesuatu yang bersifat tunggal dan universal, melainkan sesuatu yang dapat dipahami dalam berbagai cara, sesuai dengan konteks sosial dan kultural masing-masing (Rorty, 1989, p. 76). Konsep ini beresonansi dengan teologi pembebasan yang menekankan bahwa interpretasi terhadap teks-teks agama harus selalu terhubung dengan realitas sosial dan kebutuhan untuk melawan penindasan (Boff, 1987, p. 125). Dalam hal ini, teologi pembebasan dapat mengadopsi pemahaman pascamodern tentang kebenaran yang terfragmentasi dan kontekstual, yang memungkinkan munculnya perspektif baru dalam ajaran agama dan moral (McLaren, 1999, p. 152). Pemikiran pascamodern ini membantu membuka jalan bagi pluralitas dalam pemahaman agama, yang lebih menghargai perbedaan dan keragaman di masyarakat (Zizek, 2001, p. 108).

Pascamodernitas juga menantang pemahaman tradisional tentang identitas dan otoritas dalam teologi. Dalam konteks ini, Derrida (1976) melalui teori dekonstruksi menawarkan metode untuk mengkritisi dan membongkar struktur otoritas yang ada dalam teks-teks keagamaan dan institusi gereja (Derrida, 1976, p. 99). Teologi pembebasan, dengan fokusnya pada pemberdayaan masyarakat miskin dan tertindas, memandang otoritas gereja yang seringkali berkolaborasi dengan struktur kekuasaan sebagai salah satu hambatan bagi terwujudnya keadilan sosial (Sobrino, 1993, p. 112).

Oleh karena itu, interaksi antara kedua pemikiran ini dapat mendorong reorientasi dalam pemahaman agama yang lebih terbuka, yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan, serta mengkritisi otoritas yang menindas (Boff, 1987, p. 89).

Seiring dengan itu, pascamodernitas mengajak untuk mendekonstruksi ideologi dan narasi yang selama ini mendominasi dalam pendidikan agama. Dalam teologi pembebasan, pendidikan agama seharusnya bukan hanya tentang mentransmisikan ajaran agama secara dogmatis, tetapi juga tentang mengkritisi struktur sosial yang menindas dan memperjuangkan pembebasan (Gutiérrez, 1973, p. 118). Pascamodernitas memberikan pendekatan yang lebih cair dalam pendidikan, di mana siswa diajak untuk mempertanyakan otoritas, struktur kekuasaan, dan bahkan tradisi yang selama ini diterima begitu saja (McLaren, 1999, p. 167). Melalui perspektif pascamodern, pendidikan agama dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial, serta membuka ruang bagi berbagai pemahaman agama yang lebih inklusif dan plural (Hall, 1997, p. 90).

Selain itu, interaksi antara teologi pembebasan dan pascamodernitas juga berhubungan erat dengan masalah keadilan sosial. Pascamodernitas menolak pandangan bahwa kebenaran sosial dan politik dapat diukur dengan satu ukuran yang sama, dan sebaliknya, mendorong pemahaman yang lebih sensitif terhadap konteks dan kebutuhan masyarakat yang beragam (Harvey, 1989, p. 88). Teologi pembebasan, dengan fokus pada keadilan sosial, memperkenalkan gagasan bahwa teologi harus mencakup perjuangan melawan ketidakadilan ekonomi dan politik yang ada di masyarakat (Dussel, 1998, p. 62). Dalam hal ini, pascamodernitas memperkuat gagasan ini dengan menekankan pentingnya pluralisme dan perbedaan dalam memahami konsep keadilan, yang dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua pihak (Lyotard, 1984, p. 52).

Pentingnya inklusivitas dalam kedua pemikiran ini juga tercermin dalam cara mereka memperlakukan keberagaman budaya dan agama. Pascamodernitas mengakui bahwa tidak ada satu narasi tunggal yang dapat menjelaskan keseluruhan realitas, sehingga keberagaman harus diterima sebagai bagian dari keberadaan manusia (Foucault, 1972, p. 92). Begitu pula, teologi pembebasan menekankan pentingnya mengakui keberagaman pengalaman hidup umat manusia, terutama mereka yang terpinggirkan dan tertindas (Boff, 1987, p. 111). Dalam hal ini, pascamodernitas memberikan perspektif yang sangat relevan dengan teologi pembebasan dalam konteks pluralitas agama dan kepercayaan (Ricoeur, 1991, p. 56). Dengan mengintegrasikan

prinsip-prinsip pascamodernitas, teologi pembebasan dapat mendorong pendidikan agama yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya dan agama di masyarakat.

Teologi pembebasan dan pascamodernitas juga memiliki kesamaan dalam hal pentingnya dialog dan keterbukaan terhadap berbagai pandangan. Pascamodernitas menolak gagasan bahwa satu pandangan atau narasi memiliki kebenaran mutlak, dan lebih memilih untuk membuka ruang bagi dialog antara berbagai perspektif (Jameson, 1991, p. 64). Demikian juga, teologi pembebasan berupaya untuk menciptakan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan, serta mengedepankan dialog antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Sobrino, 1993, p. 121). Dalam interaksi ini, keduanya berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perbedaan, serta mempromosikan pemahaman agama yang lebih dinamis dan relevan dengan tantangan sosial saat ini (Zizek, 2001, p. 110).

Dengan demikian, interaksi antara teologi pembebasan dan pascamodernitas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan agama yang lebih adil dan inklusif. Keduanya memberikan perspektif baru yang memungkinkan pendidikan agama untuk tidak hanya berfokus pada doktrin agama, tetapi juga pada perjuangan untuk keadilan sosial dan pemberdayaan mereka yang terpinggirkan (Harvey, 1989, p. 95). Melalui interaksi ini, pendidikan agama dapat menjadi alat untuk meruntuhkan struktur kekuasaan yang menindas dan menciptakan masyarakat yang lebih egaliter dan penuh kasih sayang (Foucault, 1972, p. 103).

### **Kontribusi Teologi Pembebasan terhadap Pendidikan Keagamaan**

Teologi pembebasan memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan keagamaan dengan mengutamakan keadilan sosial dan pembebasan individu dari berbagai bentuk penindasan. Salah satu kontribusi utama dari teologi ini adalah penekanan pada pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan individu dan komunitas yang tertindas (Gutiérrez, 1973, p. 79). Teologi pembebasan memandang pendidikan agama bukan hanya sebagai proses mentransmisikan pengetahuan dogmatis, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah struktur sosial yang menindas (Boff, 1987, p. 98). Dalam konteks ini, pendidikan agama harus mengajak siswa untuk memahami masalah ketidakadilan sosial dan bagaimana ajaran agama dapat digunakan untuk melawan penindasan tersebut (Sobrino, 1993, p. 111). Oleh karena itu, pendidikan

keagamaan dalam perspektif teologi pembebasan harus berfokus pada pemberdayaan sosial, bukan sekadar pembelajaran tentang ajaran agama secara teoritis.

Selain itu, teologi pembebasan mengajak pendidikan keagamaan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan pembebasan dalam kurikulumnya. Gutiérrez (1973) menekankan bahwa pendidikan agama harus melibatkan pembelajaran tentang penderitaan dan perjuangan orang miskin serta kelompok tertindas dalam masyarakat (Gutiérrez, 1973, p. 95). Pendidikan agama yang berbasis teologi pembebasan bertujuan untuk memotivasi siswa agar terlibat dalam aksi-aksi sosial yang mendorong perubahan sosial yang lebih adil (Dussel, 1998, p. 67). Dalam hal ini, teologi pembebasan memperkenalkan konsep bahwa keselamatan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi, yang harus diwujudkan dalam tindakan konkret di dunia ini (Boff, 1987, p. 115). Oleh karena itu, pendidikan keagamaan yang dipengaruhi oleh teologi pembebasan harus memperkenalkan siswa kepada dunia yang lebih luas, di mana mereka dapat belajar untuk melihat agama sebagai alat perubahan sosial.

Teologi pembebasan juga memberi perhatian besar pada peran gereja dalam pendidikan agama dan perubahan sosial. Dalam hal ini, gereja dipandang bukan hanya sebagai lembaga yang menyampaikan ajaran agama, tetapi sebagai agen perubahan yang berfokus pada pemberdayaan komunitas yang tertindas (Sobrinho, 1993, p. 125). Dengan demikian, pendidikan keagamaan tidak dapat terlepas dari kritik terhadap struktur kekuasaan yang mendominasi, baik dalam gereja itu sendiri maupun dalam masyarakat (Harvey, 1989, p. 85). Teologi pembebasan mengajarkan bahwa gereja harus berpihak pada orang-orang miskin dan tertindas, dan ini harus tercermin dalam pendidikan agama yang diberikan kepada umat (Boff, 1987, p. 129). Dalam konteks ini, pendidikan agama menjadi sarana untuk melawan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, dengan gereja sebagai pelopor perubahan sosial yang memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggirkan.

Konsep-konsep dalam teologi pembebasan yang berfokus pada ketidakadilan sosial juga sangat relevan dalam konteks pascamodernitas. Pascamodernitas, yang menekankan pluralitas, dekonstruksi, dan relativisme kebenaran, membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas dalam pendidikan agama (Lyotard, 1984, p. 56). Dalam konteks ini, teologi pembebasan dapat mengadaptasi pemikiran pascamodern tentang kebenaran yang tidak bersifat tunggal dan universal, dan memperkenalkan pemahaman agama yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman sosial dan budaya

(Foucault, 1972, p. 74). Hal ini penting, mengingat bahwa pendidikan agama perlu mampu mengakomodasi pluralitas pandangan dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat (Hall, 1997, p. 89). Dengan demikian, teologi pembebasan tidak hanya mengajak untuk memperjuangkan keadilan sosial, tetapi juga mendorong pendidikan agama yang mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan kebebasan dalam berpikir.

Pendidikan agama yang berbasis pada teologi pembebasan juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Sebagai contoh, kurikulum pendidikan agama yang dipengaruhi oleh teologi pembebasan harus dapat mengakomodasi tantangan-tantangan kontemporer seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan diskriminasi rasial (Gutiérrez, 1973, p. 89). Hal ini juga sejalan dengan ide pascamodernitas yang menolak pandangan tunggal dan mengakui bahwa pemahaman kita terhadap dunia selalu dibentuk oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang (Rorty, 1989, p. 93). Oleh karena itu, pendidikan agama perlu mengajarkan siswa untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah sosial ini melalui lensa teologi yang kritis dan kontekstual (McLaren, 1999, p. 120). Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Selain itu, teologi pembebasan juga memberikan kontribusi dalam menciptakan ruang bagi dialog antaragama dan antarbudaya dalam pendidikan keagamaan. Dalam banyak konteks, pendidikan agama sering kali terjebak dalam klaim kebenaran tunggal dan dogmatis, yang dapat menutup peluang untuk dialog dan pemahaman lintas agama (Boff, 1987, p. 148). Teologi pembebasan, dengan penekanannya pada pluralitas dan kesetaraan, mengajarkan bahwa dialog antaragama adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan pemahaman bersama dalam masyarakat yang multikultural (Sobrinho, 1993, p. 138). Dengan demikian, pendidikan agama yang dipengaruhi oleh teologi pembebasan akan mendorong siswa untuk tidak hanya menghargai keyakinan agama mereka sendiri, tetapi juga untuk membuka diri terhadap pemahaman tentang agama dan budaya orang lain (Zizek, 2001, p. 95). Dalam konteks globalisasi yang semakin menghubungkan berbagai budaya dan agama, dialog ini menjadi semakin penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran.

Teologi pembebasan juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter sosial yang kritis di kalangan siswa. Pendidikan agama yang berbasis pada

teologi ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk mempertanyakan otoritas dan struktur yang ada, serta untuk berdiri di sisi mereka yang tertindas (Gutiérrez, 1973, p. 112). Pendidikan agama ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teologis semata, tetapi juga pada pengembangan sikap-sikap sosial yang peduli terhadap keadilan, kebebasan, dan pemberdayaan (Dussel, 1998, p. 102). Melalui pendekatan ini, pendidikan agama dapat membantu membentuk individu yang tidak hanya religius secara pribadi, tetapi juga berkomitmen pada perubahan sosial yang lebih besar (Boff, 1987, p. 136). Oleh karena itu, teologi pembebasan memberikan kontribusi penting dalam menciptakan generasi muda yang peduli terhadap masalah-masalah sosial dan yang siap untuk mengambil peran dalam perubahan sosial yang lebih luas.

Selanjutnya, teologi pembebasan juga berkontribusi pada pengembangan pemikiran kritis dalam pendidikan agama. Dalam banyak tradisi agama, ajaran sering kali disajikan tanpa mempertanyakan kembali konteks sosial dan historisnya. Teologi pembebasan mendorong siswa untuk melihat ajaran agama tidak hanya sebagai dogma yang harus diterima, tetapi sebagai alat untuk membebaskan diri dari ketidakadilan (Sobrinho, 1993, p. 142). Dengan pemahaman ini, pendidikan agama tidak hanya bertujuan untuk membentuk individu yang taat, tetapi juga individu yang kritis terhadap ketidakadilan dan siap untuk berkontribusi dalam perjuangan sosial (McLaren, 1999, p. 136). Hal ini membuka peluang untuk menciptakan pendidikan agama yang tidak hanya berfokus pada doktrin, tetapi juga pada aplikasi ajaran agama untuk kehidupan sosial yang lebih adil dan berkeadilan.

Dengan demikian, teologi pembebasan memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan keagamaan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer. Melalui pendekatan yang mengutamakan keadilan sosial, pluralisme, dan pemberdayaan, teologi ini memungkinkan pendidikan agama untuk menjadi sarana perubahan sosial yang lebih besar, bukan hanya untuk individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan (Gutiérrez, 1973, p. 118). Pendidikan agama yang berbasis pada teologi pembebasan mengajak siswa untuk memahami ajaran agama sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan dan untuk memperjuangkan hak-hak yang tertindas (Dussel, 1998, p. 111). Oleh karena itu, teologi pembebasan bukan hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman agama, tetapi juga terhadap pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara.

## **KESIMPULAN**

Teologi pembebasan menawarkan kontribusi signifikan terhadap pendidikan keagamaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, pembebasan, dan pemberdayaan mereka yang tertindas. Dengan mengintegrasikan pendekatan pascamodernitas yang menekankan pluralisme dan dekonstruksi, teologi pembebasan mampu memberikan perspektif baru dalam mengajarkan agama yang tidak hanya berfokus pada doktrin, tetapi juga pada tindakan sosial yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat yang lebih adil. Pendidikan keagamaan yang dipengaruhi oleh teologi pembebasan mendorong siswa untuk memahami ajaran agama dalam konteks sosial dan historis, serta terlibat dalam perjuangan untuk melawan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Dengan demikian, teologi pembebasan tidak hanya mengajak untuk mengajarkan agama, tetapi juga untuk mengubah struktur sosial yang menindas.

Melalui pengajaran yang berbasis pada pemahaman yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, teologi pembebasan dalam pendidikan keagamaan membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan sikap kritis terhadap ketidakadilan sosial dan budaya yang ada. Pendidikan agama yang didasari oleh teologi pembebasan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran tentang agama, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter sosial yang peduli terhadap perubahan positif di masyarakat. Oleh karena itu, teologi pembebasan memiliki potensi besar untuk menciptakan pendidikan keagamaan yang lebih relevan, adil, dan mampu mengakomodasi keberagaman serta tantangan sosial yang berkembang di era pascamodern ini.

## **REFERENSI**

- Gutiérrez, G. (1973). *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation*. Orbis Books.
- Boff, L. (1987). *Church: Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional Church*. Orbis Books.
- Sobrino, J. (1993). *Jesus the Liberator: A Historical-Theological View*. Orbis Books.
- Dussel, E. (1998). *The Ethics of Liberation: In the Age of Globalization and Exclusion*. Duke University Press.
- Hall, S. (1996). *The Question of Cultural Identity*. Sage Publications.

- Lyotard, J.-F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. University of Minnesota Press.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Pantheon Books.
- Derrida, J. (1976). *Of Grammatology*. Johns Hopkins University Press.
- Caputo, J. D. (1997). *The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion*. Indiana University Press.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Blackwell.
- Jameson, F. (1991). *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Duke University Press.
- Rorty, R. (1989). *Contingency, Irony, and Solidarity*. Cambridge University Press.
- Asad, T. (2003). *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford University Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications.
- Gergen, K. J. (1999). *An Invitation to Social Construction*. Sage Publications.
- Houtart, F. (2009). *The Globalization of Christianity and Liberation Theology*. Peter Lang.
- Mignolo, W. D. (2000). *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*. Princeton University Press.
- McLaren, P. (1999). *Schooling as a Ritual Performance: Toward a Political Economy of Educational Symbols and Gestures*. Routledge.
- Ricoeur, P. (1991). *Narrative and Interpretation*. Routledge.
- Zizek, S. (2001). *On Belief*. Routledge.
- Gutierrez, G. (2005). *The Liberation of Theology*. Orbis Books.
- Eagleton, T. (1996). *The Illusions of Postmodernism*. Blackwell.
- Dawson, M. (2011). *The Age of Atheists: How We Have Sought to Live Since the Death of God*. W. W. Norton & Company.
- McLaren, P. (2000). *Che Guevara, Paulo Freire, and the Politics of Education*. Rowman & Littlefield.